

Ringkasan Eksekutif



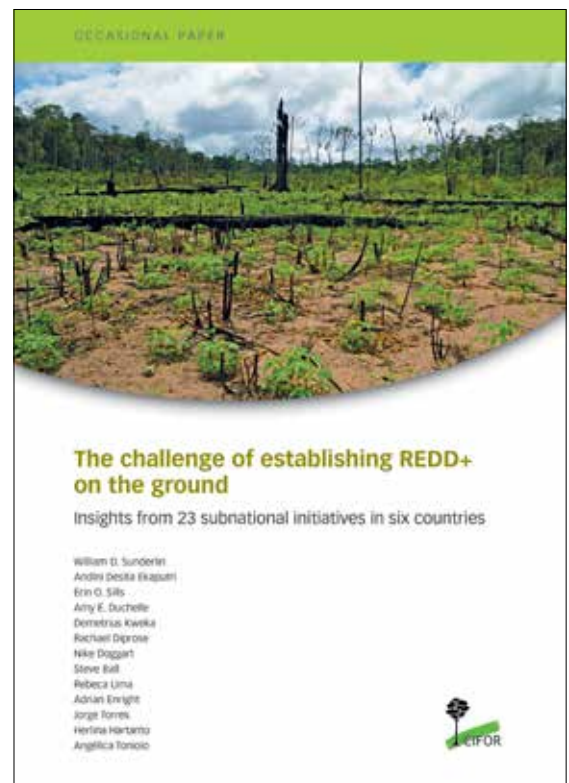
Pemandangan bentang alam di lokasi SNV, Cat Tien, Provinsi Lam Dong, Vietnam.

Foto oleh Thu Ba Huynh

Tantangan untuk Menetapkan REDD+ di Lapangan Wawasan dari 23 Inisiatif Subnasional di Enam Negara

William D. Sunderlin, Andini Desita Ekaputri, Erin O. Sills, Amy E. Duchelle, Demetrius Kweka, Rachael Diprose, Nike Doggart, Steve Ball, Rebeca Lima, Adrian Enright, Jorge Torres, Herlina Hartanto dan Angélica Toniolo

Sejak 2007, ada harapan tinggi bahwa REDD+ akan berhasil memenuhi kriteria 3E+ (efektivitas, efisiensi, kesetaraan, manfaat-manfaat sosial dan lingkungan hidup) untuk strategi dalam mereduksi emisi gas rumah kaca. Konsep aslinya adalah untuk menawarkan insentif bersyarat berbasis kinerja untuk konservasi hutan, dengan demikian mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Harapannya adalah bahwa insentif ini akan akhirnya didanai sebagian besarnya melalui pasar internasional yang kuat dalam offset karbon hutan yang dihasilkan melalui pengurangan emisi terverifikasi. Sejak 2007 ratusan inisiatif REDD+ subnasional telah dimulai, terutama di negara-negara berkembang tropis. Inisiatif ini mencakup pendekatan yurisdiksi subnasional (yaitu dipimpin oleh negara/provinsi atau kotamadya/kabupaten), dan juga oleh proyek-proyek REDD+ berlokasi khusus. Meskipun ada kemajuan-kemajuan berarti, antusiasme awal untuk REDD+ telah hilang di antara beberapa pemangku kepentingan, sebagian besarnya karena kegagalan untuk memperoleh kesepakatan perubahan iklim internasional. Sebelum COP 2013 di Warsawa, para pemrakarsa banyak inisiatif subnasional REDD+ mengemukakan kekhawatiran mereka mengenai apakah usaha mereka selama bertahun-tahun untuk meluncurkan REDD+



Versi lengkap publikasi ini dapat diunduh di cifor.org/Establishing_REDD_on_ground



Lokakarya partisipatoris untuk membentuk konsep REDD+, Jari/Amapá REDD+ Project, Amapá, Brazil.

Foto oleh Robson Silva

memang ada artinya. ‘Kesepakatan Warsawa tentang REDD+,’ yang dihasilkan oleh COP, memberikan arahan prosedural untuk negara-negara untuk menyejajarkan strategi REDD+ dengan pendorong deforestasi dan degradasi, menetapkan tingkat referensi nasional, dan menerapkan MRV (pengukuran, pelaporan dan verifikasi) dan sistem informasi pengamanan, tetapi kekhawatiran mengenai ketidakpastian pendanaan tetap ada.

Dalam konteks inilah Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+ (GCS) melakukan sebuah survei pada 23 inisiatif REDD+ subnasional di enam negara dari Desember 2012 sampai Juni 2013 untuk mengkaji strategi dan pendekatan mereka, sifat dari tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana cara mereka akan menghadapinya.

Studi tersebut menemukan bahwa ke 23 inisiatif tersebut tetap gigih dalam usaha mereka untuk mengurangi deforestasi setempat dan degradasi, dan juga mengemukakan sejumlah besar sasaran. Akan tetapi, ada banyak pertanyaan mengenai apakah dan bagaimana konsep REDD+ akan bertahan dan berubah, berdasarkan bukti berikut ini:

- Delapan belas dari 23 pemrakarsa telah memiliki atau akan mengimplementasikan insentif bersyarat (aslinya dipandang sebagai kunci menuju REDD+), tetapi hanya sembilan yang memandangnya sebagai intervensi tunggal yang paling penting untuk mengurangi emisi karbon hutan di lokasi mereka. Hal ini dapat berupa fungsi pengaturan waktu, dengan banyak faktor yang mengarah pada penundaan dalam implementasi efektif dari insentif bersyarat. Para pemrakarsa telah memfokuskan pada intervensi-intervensi lain sambil menunggu diletakkannya dasar-dasar politik, ekonomi dan teknologi REDD+. Terkait hal tersebut, beberapa pemrakarsa ragu-ragu untuk menjanjikan sokongan mata pencaharian bersyarat kepada para pemangku

kepentingan setempat untuk menghindari bangkitnya harapan yang mungkin tidak dapat mereka penuhi, bila pendanaan tidak tersedia. Menambahkan pada keperluan untuk berhati-hati merupakan fakta bahwa insentif bersyarat pada tingkat lokasi masih bersifat percobaan. Misalnya, daripada pembayaran secara tunai, sebagian dari para pemrakarsa sedang merencanakan untuk menawarkan sejumlah barang dan layanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan penghidupan setempat sebagai insentif bersyarat. Yang penting, kebersyaratan dapat diterapkan pada berbagai skala, dan di beberapa lokasi telah terjadi pergeseran dari proyek menjadi pendekatan yuridiksional, diikuti dengan ditinggalkannya gagasan awal REDD+ mengenai insentif bersyarat untuk para agen tata-guna lahan perorangan yang mendukung pengembangan model-model emisi rendah yang lebih luas. Tanpa mengesampingkan berbagai penjelasan ini, fakta bahwa sebagian besar pemrakarsa tidak mengidentifikasi kebersyaratan, mekanisme pada inti REDD+, sebagai intervensi yang paling penting menunjukkan beberapa keraguan mengenai sentralitasnya.

- Ketika ditanyakan mengenai persentase kemungkinan bahwa inisiatif mereka akan terus berfungsi sebagai inisiatif REDD+ pada 2015, 11 responden menyatakan 90-100%, lima mengatakan 50-70%, tiga mengatakan 0% (karena tanggung jawab untuk lokasi tersebut akan segera dialihkan kepada organisasi lain) dan empat telah memandang diri mereka sebagai bukan “REDD+.” Hal ini menunjukkan divergensi di antara inisiatif yang diluncurkan semula di bawah payung REDD+, dengan hampir separuh sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga label REDD+ dan kira-kira sepertiganya berpikir untuk meninggalkan konsep tersebut atau telah melakukannya.
- Hampir semua dari 23 inisiatif tersebut memasukkan intervensi yang merupakan karakteristik dari proyek-proyek konservasi dan pembangunan terpadu (ICDP), suatu pendekatan terhadap perlindungan hutan tropis sebelum



Masyarakat dalam diskusi rencana penghidupan, desa Petak Puti, lokasi KFCP, Kalimantan Tengah.

Foto oleh James Maiden/IAFCP

REDD+ dan yang secara umum dianggap telah gagal. Hibridisasi ICDP dan REDD+ bersifat logis (separuh dari inisiatif tersebut merupakan ICDP sebelum REDD+) dan dapat berguna bila intervensi ICDP berperan sebagai pelengkap fungsional terhadap insentif bersyarat dan memungkinkan para pemrakarsa untuk terlibat dengan komunitas tersebut sambil menunggu ekonomi REDD+ menjadi lebih memungkinkan. Namun, ketergantungan tinggi pada pendekatan ICDP dapat juga menjadi penghambat terhadap pengadopsian langkah-langkah berbasis kinerja yang diharapkan untuk menjadikan REDD+ lebih efektif dari berbagai intervensi sebelumnya.

- Para pemrakarsa mengidentifikasi penguasaan lahan yang tidak jelas dan tidak stabil dan kinerja ekonomi REDD+ yang kurang bersaing sebagai tantangan terbesar yang dihadapi untuk maju dengan REDD+. Berbagai tantangan ini hanya dapat ditangani dengan perubahan-perubahan struktural dalam sistem politik nasional dan subnasional. Misalnya, kepentingan 'bisnis seperti biasa' cenderung mendominasi ekonomi politik dari keputusan-keputusan penggunaan lahan, REDD+ sering kali tidak dapat bersaing dengan penggunaan lahan non-hutan dan pasar karbon hutan lemah dan tidak stabil. Jadi, masa depan REDD+ bergantung pada para pelaku dan berbagai tindakan di luar wilayah/domain REDD+. Dalam konteks ini, sebagian besar inisiatif subnasional merasakan sulit untuk memenuhi sasaran 3E+ dari REDD+. tetapi terlibat dalam usaha-usaha kreatif untuk memenuhi sasaran ini.

Sebagian besar pemrakarsa REDD+ puas dengan kinerja mereka namun memiliki keraguan mengenai prospek mereka untuk keberhasilan akhir. Agar REDD+ berhasil di lapangan, dipahami bahwa perubahan transformasional diperlukan dari kebijakan dan kepentingan yang mendukung deforestasi dan degradasi, dan juga hal-hal yang mendukung ketergantungan terus-menerus pada bahan bakar fosil. Terkait hal tersebut, harus ada percepatan usaha menuju pencapaian kesepakatan perubahan iklim global, karena kesepakatan semacam itu dapat menjadi kunci untuk memotivasi penyelesaian berbagai masalah tenurial pada tingkat nasional dan untuk menciptakan aliran pendanaan kuat, stabil dan berjangka panjang untuk mendukung REDD+.

Di luar ini, berbagai perubahan kebijakan nasional dan subnasional diperlukan dalam dua lingkup yang diidentifikasi oleh para responden : penguasaan lahan dan ekonomi REDD+.

Agar para pemrakarsa REDD+ dapat mewujudkan sasaran tentang penguasaan lahan yang stabil dan aman untuk para pemangku kepentingan di lokasi mereka, diperlukan berbagai intervensi seperti di bawah ini dalam sebagian besar konteksnya:

- Kaitan langsung reformasi penguasaan lahan hutan dengan hasil-hasil lingkungan bertarget sebagaimana telah diusahakan di Brasil melalui program *Terra Legal* dan *Rural Environment Registry* yang menyertainya.



Dua orang sedang membaca GPS, lokasi SNV, Lam Dong, Vietnam.

Foto oleh Thu Ba Huynh



Kunjungan lapangan selama pertemuan tahunan dengan Satuan Khusus para Gubernur untuk Hutan dan Iklim, lokasi BAM, Madre de Dios, Peru.

Foto oleh Marco Villegas

- Penggabungan perencanaan tata guna lahan hutan di antara berbagai kementerian dan sektor dan penyejajaran dengan sasaran-sasaran REDD+ telah dicoba di Indonesia melalui kebijakan 'Satu Peta'-nya.
- Dimasukkannya pemetaan penguasaan lahan bersama ke lembaga dan proses tenurial nasional.
- Penyelesaian persaingan antara klaim berdasarkan undang-undang dan berdasarkan adat terhadap lahan hutan.
- Penegakan hak pengecualian yang ada untuk para pemangku kepentingan setempat.
- Klarifikasi hak-hak penguasaan karbon hutan.
- Mengaktifkan kerja sama REDD+ antara berbagai organisasi pemrakarsa dan lembaga pemerintah dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah, seperti yang terjadi di Brasil.



Diskusi kelompok terfokus dalam pengumpulan data CIFOR di lokasi Gunung Kamerun, Likombe, Kamerun.

Foto oleh Abdon Awono

- Untuk memperoleh dasar ekonomi yang dapat dilaksanakan untuk REDD+, aliran dana kuat dapat dilengkapi dengan kebijakan dan tindakan nasional seperti berikut:
- Pemisahan pertumbuhan pertanian dari perluasan wilayah pertanian (misalnya mengejar pendekatan 'pencadangan lahan').
- Mengembangkan rantai suplai pertanian berkelanjutan yang berkorespondensi dengan sasaran-sasaran REDD+.
- Mengurangi permintaan kayu bakar di pusat-pusat pedesaan.
- Meningkatkan pengambilan keputusan tata guna lahan melalui perhatian pada tata kelola dan pengurangan korupsi dan kronisme yang nyata.
- Menegakkan hukum terhadap pembalakan liar dan kegiatan melawan hukum lainnya yang mengarah pada konversi lahan hutan (misalnya melalui FLEGT).

Yang penting, tindakan kebijakan terhadap tenurial dan ekonomi harus saling menguatkan. Penguasaan lahan hutan yang jelas menaikkan manfaat kompetitif REDD+ sambil mengurangi daya tarik finansial dari berbagai kegiatan 'bisnis seperti biasa' yang berkaitan dengan REDD+. Bila REDD+ menarik aliran pendanaan yang lebih besar, hal tersebut dapat memotivasi kepentingan negara menuju klarifikasi penguasaan lahan lebih jauh.

Sementara suatu kesepakatan perubahan iklim global yang mengikat akan menjadi langkah besar bagi REDD+, tanpa adanya kesepakatan serupa, ada berbagai peluang penting untuk tindakan kuat terhadap front-front kebijakan nasional dan subnasional untuk memastikan bahwa berbagai kemajuan dalam mitigasi berbasis hutan di lapangan tidaklah sia-sia.



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetik pohon yang mencakup lanskap dari hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin CRP-FTA melalui kemitraan dengan Bioersity International, CATIE, CIRAD, International Center for Tropical Agriculture dan World Agroforestry Centre.



cifor.org

ForestsClimateChange.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

